

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian terdahulu

Kajian yang telah dilakukan menjadi referensi utama rujukan untuk penyusun memperoleh referensi serta landasan konsep yang akan diterapkan dalam riset ini. Peneliti memilih topik berdasarkan sumber yang relevan dengan topik yang sedang dikaji.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL JURNAL	HASIL PENELITIAN	RELEVANSI
1.	<p>Judul: Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak tahun 2019</p> <p>Penulis: M. Choirullah P, M Rahmatunnisa, & Ari Ganjar H. (2020). Jurnal: <i>Jurnal Politik Islam</i> , Vol. 3 No 2 Juli – Desember 2020.</p>	<p>Dalam jurnal ini, penulis membahas dan menganalisis strategi yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu Serentak 2019. Penelitian ini mengkaji lebih dalam mengenai strategi sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Bekasi untuk mendorong keikutsertaan masyarakat pada Pemilu 2019, yang merupakan pemilihan dengan kondisi yang belum pernah terjadi dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dilakukan penyuluhan secara luas dan menyasar berbagai lapisan penduduk. Strategi sosialisasi yang dilaksanakan terpisah</p>	<p>Dalam jurnal berjudul "Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak 2019," dijelaskan KPU Kota Bekasi melaksanakan penyuluhan dengan luas, secara adil, dan menargetkan berbagai kelompok sosial. Pendekatan proaktif KPU Kota Bekasi pada penyuluhan dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu meningkatkan jangkauan pasar serta merambah pasar yang lebih spesifik. Untuk mengoptimalkan partisipasi pemilih, KPU Kota Bekasi melakukan pemerataan sosialisasi, terutama di wilayah dengan kecenderungan peningkatan partisipasi. Selain itu, KPU Kota</p>

		menjadi dua pendekatan, yaitu meningkatkan jangkauan pasar serta merambah pasar yang lebih spesifik.	Bekasi juga menargetkan wilayah perbatasan, yang sebelumnya menunjukkan tingkat partisipasi rendah dalam pemilu-pemilu sebelumnya, dengan tujuan untuk meningkatkan sosialisasi di daerah tersebut.
2.	<p>Judul: Upaya KPU Kota Semarang dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang 2020.</p> <p>Penulis: Indah Apriliah P, Puji Astuti, & Fitriyah.</p> <p>Jurnal: <i>Journal Of Politic and Government Studies</i></p>	<p>Dalam jurnal ini, penulis membahas usaha dan tantangan yang dihadapi oleh KPU Kota Semarang dalam meningkatkan keterlibatan warga pada pemilihan walikota 2020. KPU Kota Semarang berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dengan merujuk pada PKPU Nomor 10 Pasal 84, menerapkan dua teknik, yaitu teknik langsung (tatap muka) serta teknik tidak langsung. Peningkatan keterlibatan masyarakat yang mencapai 68,30% pada pemilihan walikota 2020 menunjukkan bahwa upaya KPU Kota Semarang telah berhasil, walaupun terdapat perubahan dalam ketentuan penyuluhan menggunakan penerapan pendekatan yang berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Kerja sama antara KPU Kota Semarang dan responden juga mempermudah penyebaran usaha guna meningkatkan keterlibatan pemilih di</p>	<p>Dalam jurnal yang berjudul “Upaya KPU Kota Semarang dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang 2020,” ditemukan bahwa target yang belum tercapai disebabkan oleh berbagai kendala dan hambatan dalam pemilihan walikota 2020 di Kota Semarang. Beberapa masalah yang dihadapi antara lain minimnya keyakinan masyarakat terhadap penyelenggara pilkada, kesalahan dalam pemutakhiran data pemilih yang berdampak pada DPT, kekeliruan petunjuk di bilik TPS, praktik politik uang yang menargetkan masyarakat dengan kondisi ekonomi rentan, serta keberadaan calon tunggal yang membuat persaingan tidak berjalan secara adil, semua ini menjadi tantangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.</p>

		berbagai lapisan masyarakat.	
3.	<p>Judul: Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati 2018 di Kabupaten Pinrang.</p> <p>Penulis: Dewi Sri, Ruskin Azikin, & Samsir Rahim.</p> <p>Jurnal: <i>JISIP</i> ISSN. 2442-6962 Vol. 6 No. 1 (2017)</p>	<p>Temuan riset ini menunjukkan bahwa cara untuk meningkatkan peran serta pemilih pemula dalam politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 memanfaatkan sinergi antara Komisi Pemilihan Umum, relawan demokrasi, serta kelompok masyarakat dalam penyuluhan. Mereka juga memberikan panduan teknis serta pelatihan kepada panitia untuk meningkatkan performa, walaupun tidak dijalankan secara berkala. Penyuluhan ditujukan pada tiga kelompok masyarakat, yaitu siswa SMA, mahasiswa, dan warga umum, dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dan memanfaatkan teknologi media. penyebab yang memengaruhi ketidakterlibatan pemilih pemula dalam memilih antara lain kesibukan harian, pengaruh keluarga, serta perasaan tidak yakin.</p>	<p>Dalam jurnal “Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati 2018 di Kabupaten Pinrang,” dijelaskan tiga tahap pendekatan yang diimplementasikan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk mendorong keterlibatan politik pemilih pemula. Tahap pertama adalah penyusunan dan sasaran jangka panjang, yang menggambarkan bahwa KPU memiliki rencana sosialisasi yang terperinci, salah satunya program relawan demokrasi yang mencakup 25 partisipan dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan kecerdasan masyarakat pemilih. Tahap kedua adalah pemilihan tindakan, di mana KPU Kabupaten Pinrang mengadakan penyuluhan terhadap tiga kelompok pemilih, yaitu siswa SMA, masyarakat umum, serta mahasiswa, menggunakan pendekatan pertemuan langsung serta media publik. Tahap ketiga adalah pembagian sumber daya, yang memperlihatkan bahwa upaya peningkatan sumber daya telah dilaksanakan dengan memberikan pelatihan teknis kepada semua</p>

			relawan demokrasi yang akan terlibat dalam sosialisasi.
4.	<p>Judul: Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pilkada Di Kabupaten Malaka Tahun 2020.</p> <p>Penulis: Maria Delsiana B, Dian Festianti, & Marissa S B.</p> <p>Jurnal: <i>Jurnal Poros Politik</i> ISSN : 2528-0953</p>	<p>Dalam penelitian ini, penulis mengkaji peran celebrity endorser untuk menginformasikan produk. Penelitian mengungkap bahwa pendekatan KPU Kabupaten Malaka untuk peningkatan keterlibatan politik pemilih pemula pada Pilkada 2020 tidak berjalan dengan maksimal. Beberapa faktor yang memengaruhi hal ini antara lain terbatasnya SDM, anggaran yang terbatas, serta dampak dari pandemi COVID-19. Akibatnya, KPU Kabupaten Malaka hanya dapat melakukan penyuluhan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube.</p>	<p>Dalam jurnal yang berjudul “Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pilkada Di Kabupaten Malaka Tahun 2020,” dijelaskan bahwa pelaksanaan strategi KPU Kabupaten Malaka dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada Pilkada belum berjalan dengan baik. Pencapaian yang belum optimal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang dimiliki KPU Kabupaten Malaka. Selain itu, situasi pandemi COVID-19 membuat KPU Kabupaten Malaka hanya bisa mengandalkan sosialisasi melalui media massa. Hal ini menjadi kendala karena banyak pemilih pemula yang tinggal di daerah terpencil dan tidak terjangkau jaringan internet, sehingga mereka tidak memperoleh informasi tentang sosialisasi tersebut.</p>
5.	<p>Judul: Strategi Komisi Pemilihan Umum Solok Selatan Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pilkada 2020.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Solok Selatan meningkat dari 67,6% pada tahun 2015 menjadi 81,1% pada Pilkada 2020. Rencana yang diterapkan</p>	<p>Dalam jurnal yang berjudul “Strategi Komisi Pemilihan Umum Solok Selatan Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pilkada 2020,” dijelaskan bahwa kerjasama yang erat antara KPU dengan tokoh</p>

	<p>Penulis: Ilham Saputra, Suryanef, & Irwan Jurnal: <i>Journal of Civic Education</i>, Vol. 5, No. 2, 2022</p>	<p>oleh KPU Solok Selatan untuk meningkatkan partisipasi pemilih meliputi analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan yang ada. Selain itu, KPU juga memberikan pembekalan dan bimbingan teknis untuk PPK, PPS, dan KPPS. Terakhir, KPU memaksimalkan sosialisasi pemilihan baik secara offline maupun online dengan memberdayakan PPK, PPS, dan KPPS serta menjalin kerja sama dengan tokoh adat.</p>	<p>adat dan tokoh masyarakat memiliki dampak besar dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Tokoh adat dan tokoh masyarakat membantu KPU Solok Selatan dalam menyebarkan informasi tentang pelaksanaan Pilkada. Dengan cara ini, KPU Solok Selatan tidak perlu lagi mengumpulkan massa dalam jumlah besar untuk sosialisasi, yang juga membantu mengurangi risiko penyebaran Covid-19. Selain itu, pemberdayaan PPK, PPS, dan KPPS untuk menyampaikan informasi terkait Pilkada turut berperan sebagai faktor pendorong meningkatnya partisipasi pemilih pada Pilkada 2020.</p>
--	--	---	--

2.2 Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai rencana KPU Kota Malang untuk peningkatan keterlibatan politik masyarakat pada pemilihan umum memerlukan analisis sumber dan pembatasan pandangan yang akan membantu menentukan arah pembahasan. Definisi yang digunakan dikaitkan dengan topik penelitian yang dibahas. Selanjutnya, akan dipresentasikan ulasan literatur yang sesuai untuk mendukung analisis dalam penelitian ini.

2.2.1 Demokrasi dan Pemilu

Sistem pemerintahan rakyat atau demokrasi ialah sistem politik yang berakar pada rakyat, oleh rakyat, dan bsgi kesejahteraan rakyat. Partisipasi sangat penting dalam demokrasi. Pemilu di Indonesia menjadi wadah untuk melaksanakan kedaulatan rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu diselenggarakan oleh pemerintah untuk memberikan kesempatan bagi rakyat untuk berperan aktif dalam pemilu, guna mewujudkan impian masyarakat Indonesia yang sesuai dengan prinsip demokrasi.

Pemilu di Indonesia juga merupakan wadah untuk menciptakan lembaga-lembaga pemerintahan berlandaskan kehendak rakyat, yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Pemilu bertujuan untuk memilih anggota legislatif yang akan bergabung di lembaga legislatif, termasuk untuk melayani kewenangan politik warga negara. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu pada waktu yang ditentukan menjadi kewajiban pemerintah dalam sistem pemerintahan.

Keterlibatan politik masyarakat sangat terkait dengan demokrasi. Pada sistem demokrasi, kekuasaan utama berada pada keputusan rakyat, yang diwujudkan dalam aktivitas kelompok untuk memilih pemimpin yang kompeten. Warga negara memilih langsung perwakilan rakyat yang akan menduduki posisi di institusi pemerintahan.

Dasar dari demokrasi yaitu pemahaman bahwa individu yang memahami apa yang terbaik untuk dirinya dapat mengambil keputusan tersebut. Dikarenakan kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap

kehidupan masyarakat, oleh karena itu setiap individu memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan yang berdampak pada hidup mereka, baik dengan memilih pemimpin, terlibat dalam kampanye, atau bergabung dengan partai politik.

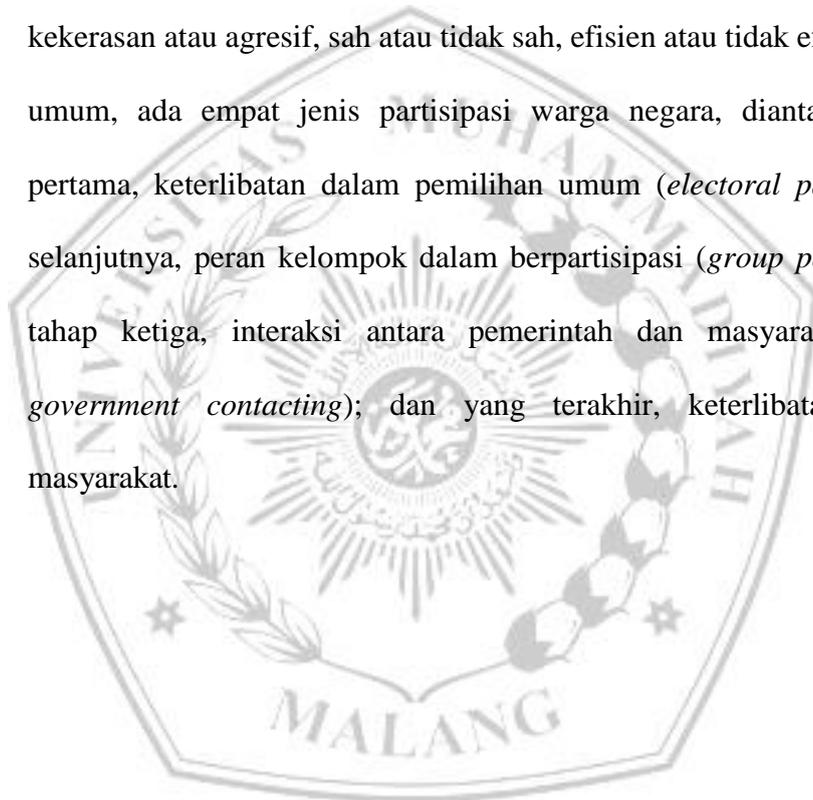
2.2.2 Partisipasi Politik

Berdasarkan pendapat Keyth Fauls dalam Anwar & Salviana, partisipasi dalam politik merupakan keikutsertaan aktif orang atau kelompok dalam aktivitas politik. Keterlibatan ini meliputi proses pengambilan keputusan, serta sikap oposisi atau penentangan terhadap pemerintah. Sementara itu, Ramlan Surbakti seperti yang dijelaskan oleh Suryo Sakti Hadiwijoyo mengemukakan sejumlah indikator dalam definisi partisipasi politik, yaitu:

- a. Partisipasi politik terkait pada aktivitas yang bisa diperhatikan secara langsung, tidak hanya sekadar perilaku atau pencapaian. Oleh karena itu, partisipasi politik berfokus pada aspek yang berdasarkan bukti, tidak di penaruhi opini pribadi.
- b. Aktivitas politik dapat diikuti oleh seluruh masyarakat, baik secara tanpa perantara serta tanpa keterlibatan langsung.
- c. Tujuan dari aktivitas politik adalah untuk mengubah keputusan yang diambil oleh pemerintah, baik melalui dorongan, tekanan, atau kemungkinan penentangan atas kebijakan atau tindakan pemerintah dalam berpolitik.
- d. Kegiatan tersebut bertujuan memengaruhi pemerintah, terlepas dari tahap kesuksesan atau keterpurukan yang mungkin terjadi.

- e. Kegiatan dapat dikerjakan baik dengan tahapan yang sah dan tanpa tindakan kasar (*konvensional*), atau melalui pendekatan yang tidak sah dan dengan kekerasan (*violence*).

Partisipasi Partisipasi mengacu kepada perilaku masyarakat sebagai individu atau kelompok yang berpartisipasi pada proses pembuatan kebijakan pemerintahan. Keterlibatan ini bisa berupa pribadi atau berkelompok, tersusun atau alami, konsisten atau tidak teratur, tanpa kekerasan atau agresif, sah atau tidak sah, efisien atau tidak efisien. Secara umum, ada empat jenis partisipasi warga negara, diantaranya: yang pertama, keterlibatan dalam pemilihan umum (*electoral participation*); selanjutnya, peran kelompok dalam berpartisipasi (*group participation*); tahap ketiga, interaksi antara pemerintah dan masyarakat (*citizen-government contacting*); dan yang terakhir, keterlibatan langsung masyarakat.



2.2.3 Tingkat Partisipasi Politik

Tingkat partisipasi merujuk pada keterlibatan masyarakat dalam tahapan pengambilan dan penerapan kebijakan politik. Keterlibatan politik mencerminkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap politik serta hubungan keyakinan mereka terhadap pemerintah.

Menurut Milbrath dan Goel dalam Ramlan Surbakti, terdapat dua faktor yang menentukan tingkat keterlibatan masyarakat, yaitu:

1. Faktor pemahaman politik, yang berkaitan dengan pemahaman langsung mengenai hak serta tugas politik sebagai bagian dari negara.
2. Faktor keyakinan terhadap pemerintahan, yang menggambarkan pertimbangan masyarakat pada pemerintahan. Warga negara bisa saja mempercayai negara sebagai lembaga yang bisa diandalkan, atau dengan cara sebaliknya, merasa tidak percaya.

2.2.4 Bentuk Partisipasi Politik

Berdasarkan pendapat Samuel P. Huntington, keterlibatan politik merupakan kegiatan warga negara dengan maksud untuk mengendalikan proses pengambilan kebijakan. Jenis-jenis keterlibatan politik merujuk pada tindakan langsung dalam politik. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, seperti yang dalam kutipan Hadiwijoyo, mendistribusikan keterlibatan politik ke dalam lima kategori, yaitu:

1. Kegiatan pemilihan, yang meliputi pemilihan langsung dalam pemilu, penggalangan dana untuk partai, menjadi bagian dari tim sukses, mendukung calon anggota legislatif atau calon eksekutif, atau langkah lainnya yang berupaya mengubah hasil pemilihan umum.

2. *Lobby*, merupakan usaha individu atau komunitas untuk mempengaruhi pemimpin pemerintahan untuk mengubah masalah tertentu.
3. Aktivitas kelompok atau kegiatan organisasi, merupakan keterlibatan pribadi dalam asosiasi, terlibat sebagai anggota atau pengarah, dengan dengan bermaksud untuk mengubah kebijakan pemerintah.
4. *Contacting*, merupakan usaha pribadi atau kelompok untuk menciptakan hubungan bersama pihak berwenang dengan tujuan mengubah kebijakan mereka.
5. Perlakuan kekerasan (*Violence*), merupakan perilaku pribadi atau kelompok yang berusaha mengubah kebijakan pemerintah untuk menghasilkan kerugian fisik atau materi, meliputi kerusakan, terorisme, perebutan kekuasaan, pembunuhan politik (*assassination*), transformasi, dan pertentangan.

Lima kategori partisipasi ini dianggap sebagai model klasik dalam kajian partisipasi politik. Keduanya tanpa membedakan apakah langkah yang diambil oleh individu atau kelompok dalam setiap pola partisipasi politik itu mematuhi hukum atau melanggar hukum. Oleh karenanya, tindakan seperti pemberian suap, intimidasi, pemaksaan, dan hal seupa juga masuk dalam ruang lingkup kajian ini.

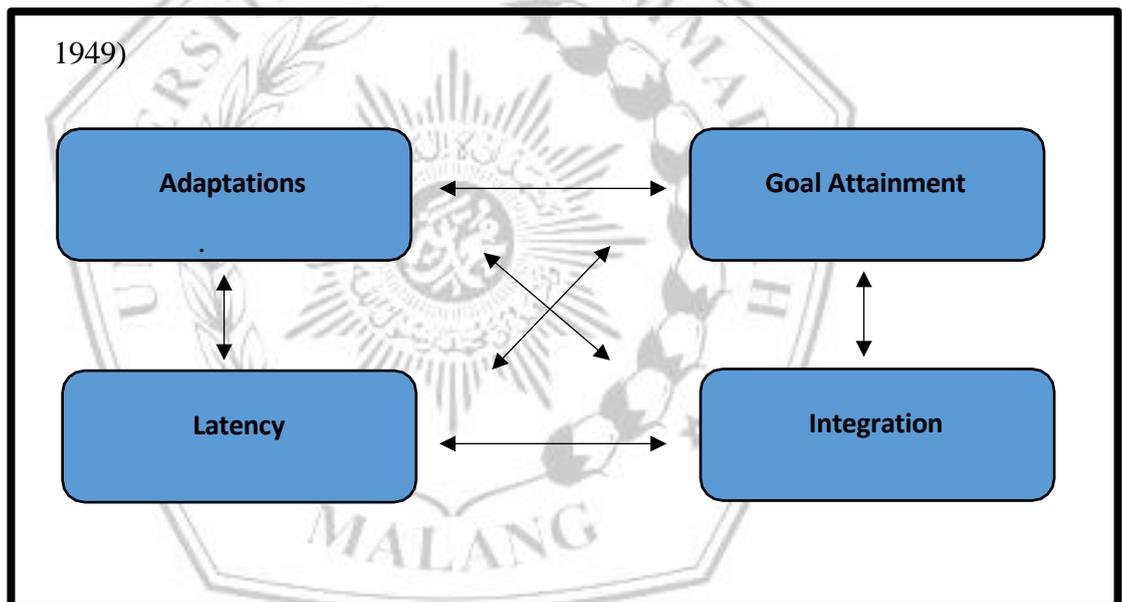
2.3 Kerangka Teori

Dalam penelitian, teori memiliki peranan penting untuk menjawab dan menyelesaikan masalah yang ada. Pendekatan Struktur Fungsional yang dipaparkan oleh Talcott Parsons diterapkan landasan pada penelitian ini. Parsons, seorang pakar sosial terkemuka asal Amerika, memandang

masyarakat melalui sudut pandang fungsional, baik dalam konteks fungsi dan mekanisme.

Pendekatan fungsional struktural yaitu pendekatan sosial yang berfokus pada konsep fungsionalisme, yang memandang masyarakat menjadi struktur yang melibatkan berbagai unsur yang berhubungan. Oleh karena itu, perubahan pada satu bagian sistem sosial dapat mempengaruhi bagian lainnya. Transformasi yang muncul dalam suatu kelompok sosial juga mampu memengaruhi masyarakat lainnya. Teori ini mengkaji peran atau fungsi dari institusi sosial dan struktur sosial tertentu dalam masyarakat, serta hubungan antara elemen-elemen sosial yang ada (Parsons,

1949)



Bagan 1.1 Teori Struktural Fungsional

Adaptation (adaptasi) berarti bahwa sistem perlu menyesuaikan diri dengan konteks dan kebutuhan yang ada. Tercapainya tujuan (*Goal Attainment*) menunjukkan bahwa sistem wajib dapat mencapai sasaran utama dengan mengutamakan perhatian tertentu. Integrasi mengacu pada pentingnya sistem untuk mengelola hubungan antar bagian-bagian yang

membentuk komponennya. Sedangkan *Latency* (pemeliharaan pola) berarti mengartikan bahwa sistem harus menjaga, mengembangkan, dan meningkatkan pola budaya yang mendukung dan memotivasi (Parsons, 1949).

Teori fungsional struktural memandang masyarakat sebagai satu kesatuan sistem yang saling terkait fungsional untuk mencapai kestabilan. Talcott Parsons berpendapat bahwa untuk menganalisis sistem sosial di masyarakat, baik yang berkaitan struktur maupun aktivitas sosial, harus dilihat dari implementasi nilai-nilai serta adaptasi terhadap lingkungan yang didampingi oleh kewajiban fungsional tertentu (Ritzer, 2010).

Dapat diketahui bahwa Talcott Parsons memiliki tujuan untuk merancang teori besar, namun pada akhirnya teori tersebut berujung pada arah yang tidak sesuai dengan tujuan awalnya. Perubahan tersebut terjadi akibat penemuan mengenai hubungan dan hal-hal baru, seperti perubahan tingkah laku dan pergeseran prinsip keseimbangan yang dinamis mengarah pada teori umum tentang sistem sibernetika. Pada konteks ini, dijelaskan bahwa perkembangan masyarakat melalui empat tahapan perubahan struktural, yang mencakup pembaruan yang, menuju penyesuaian dalam proses evolusinya. Talcott Parsons mengaitkan dengan empat syarat fungsional yang telah disebutkan untuk menganalisis perubahan. Berdasarkan pemikiran Parsons, sistem sosial akan tetap bertahan jika empat fungsi dalam skema AGIL dijalankan yaitu Adaptasi, Pencapaian Tujuan, Integrasi dan *Latency*.

a. *Adaptation* (Adaptasi)

Sebuah mekanisme harus sanggup menghadapi kondisi luar yang sulit dan beradaptasi pada kondisi sekitarnya. Pada konteks masyarakat, ini berarti kita harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sekitar masyarakat yang ada, dan beradaptasi pada kondisi tersebut. Penyesuaian diri mencakup tindakan untuk melindungi sumber daya yang ada di lingkungan serta menyalurkan melewati sistem yang tersedia. Setiap masyarakat diwajibkan untuk dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia agar sistem dapat efektif.

b. *Goal attainment* (pencapaian tujuan)

Sebuah mekanisme perlu menentukan dan memperoleh sasaran pokok. Keberhasilan sasaran ini berhubungan dengan penetapan keutamaan di antara sasaran mekanisme, serta mobilisasi potensi yang ada untuk mencapainya. Sistem berupaya meraih tujuan yang sudah dirumuskan dengan jelas dari pertama. Peran dari pencapaian tujuan ini yaitu untuk mengoptimalkan keahlian masyarakat dalam meraih sasaran bersama.

c. *Integration* (integrasi)

Struktur perlu mengelola hubungan di antara komponen-komponen yang menyusun bagiannya, dengan melakukan kerja sama serta perawatan hubungan antar komponen-komponen yang ada dalam sistem. Sistem harus dapat mengelola hubungan antar tugas-tugas lainnya. Hal ini berarti bahwa sistem harus dapat mengelola hubungan-

hubungan tersebut dengan baik agar seluruh bagian dari sistem dapat berjalan dengan semestinya.

d. *Latency* (Pemeliharaan pola)

Sistem harus dapat memenuhi, mempertahankan, serta meningkatkan tata cara etnis serta motivasi individu yang mendukung dan menguatkan dorongan tersebut.

